

KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

I.G.A Wahyuni Pereira S.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This research problems is how urban PNPM Mandiri Program Effectiveness in reducing poverty in the village Morokrembangan. This study uses qualitative research methods with the type of descriptive research and data collection through interviews, observation, and documentation. Determination of informants by purposive sampling and snowball sampling followed by covering the informant who was in the village Morokrembangan, members of management and the BKM Morosejahtera Morokrembangan active village community to follow the activities of urban PNPM Mandiri. Data analysis was conducted by examining, categorizing, and combine the evidence obtained to refer to the starting point of the study. Data validity is tested through triangulation of data sources so that the data presented is valid data. Conclusions obtained from this study is the effectiveness of Program National Community Empowerment (PNPM) urban areas in an effort to alleviate poverty by empowering the community in the village Morokrembangan has been effective and empowering people though still erdapat things that need to be improved and repaired so that the Compliance Program national community empowerment in the hope the people residing in villages Morokrembangan can be achieved and provides updates to the community in the village Morokrembangan.

Keyword: PNPM Urban, KSM, BKM, Community Empowerment

Pendahuluan

Saat ini di berbagai media masa dapat diketahui tentang meningkatnya berbagai permasalahan yang ada di berbagai kota besar di Indonesia. Permasalahan-permasalahannya antara lain meningkatnya pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, meningkatnya warga pelosok yang terkena busung lapar, menipisnya jumlah air bersih di daerah-daerah pelosok, meningkatnya jumlah wilayah yang terkena banjir ketika musim penghujan, meningkatnya jumlah anak jalanan dan pengemis serta permasalahan-permasalahan kependudukan lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut sering sekali dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk tidak mampu yang ada di Indonesia.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong standar garis kemiskinan. Diluar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan dilapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin, membangun infrastruktur di pemukiman kumuh, pembangunan modal pembangunankawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain. Untuk berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun harus diakui bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan saat ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Diantara berbagai upaya yang dikembangkan pemerintah dalam membantu masyarakat tersebut adalah dengan mengembangkan suatu kegiatan atau ekonomi produktif yang terikat dalam suatu program dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional dewasa ini. Munculnya model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman kegagalan strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu, tetapi juga pengalaman negara-negara maju yang kemudian mendorong terjadinya reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sebagai sentral kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan.

Dalam model pembangunan yang berpusat pada modal, teknologi, mesin, dan uang menjadi instrumen pokok dalam aktivitas pembangunan, sedangkan keterlibatan manusia hanya menjangkau sebagian kecil golongan yang termasuk ke dalam kelompok pemilik modal, penguasa politik, para ahli, dan sebagian kecil kelompok manusia sebagai tenaga produksi. Pada akhirnya, strategi pembangunan semacam ini menciptakan dehumanisasi; manusia yang kehilangan jiwa, inisiatif, pasif, dan tidak berdaya (*powerless*). Ketiadaan akses terhadap sumber-sumber tersebut menyebabkan masyarakat umum tidak dapat menikmati berbagai macam kesempatan seperti ekonomi (pekerjaan), politik, pendidikan, pelayanan sosial dan pelayanan publik lainnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu program yang mampu memperluas prospek dan pilihan bagi masyarakat untuk dapat hidup berkembang di masa depan khususnya masyarakat miskin di daerah perkotaan. Salah satu program pemberdayaan utama pemerintah ialah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau disebut juga dengan PNPM mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat memang sangat di butuhkan untuk membantu merubah kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Salah satu kota yang masih terdapat masyarakat miskin ialah Kota Surabaya. Sebagai konsekuensi atau dampak yang harus ditanggung bagi Kota yang dituju oleh kaum urban seperti halnya Jakarta, Surabaya pun menghadapi persoalan serupa diantaranya problem kepadatan penduduk yang semakin pesat, kemacetan, polusi, sampah, kriminalitas, banjir, pengangguran, gepeng (baca: gelandangan dan pengemis), pemukiman liar dan kumuh, pedagang kaki lima (PKL) liar, dan munculnya kelompok-kelompok miskin perkotaan. Seperti yang sudah dikaji para ahli, kota yang tumbuh menjadi Kota metropolitan, ternyata disaat yang sama harus berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong-bondong masuk ke Kota besar.

Tabel 2

Jumlah penduduk miskin perkecamatan kota Surabaya tahun 2012

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah seluruh Penduduk	% Penduduk Miskin per Kecamatan
Surabaya Pusat :				
1	Tegalsari	8.612	93.465	
2	Genteng	7.175	54.505	
3	Bubutan	4.129	87.883	
4	Simokerto	16.453	84.380	
	Total Surabaya	36.369	320.233	11,36
Surabaya Utara :				
5	Pabean Cantikan	13.724	72.744	
6	Semampir	45.302	154.455	
7	Krembangan	6.597	114.506	
8	Kenjeran	7.550	131.857	
	Total Surabaya	73.173	487.562	15,43
Surabaya Timur				
9	Tambaksari	26.991	188.886	
10	Gubeng	7.544	132.986	
11	Rungkut	14.328	111.286	
12	Tenggilis Mejoyo	3.886	76.154	
13	Gunung Anyar	4.822	51.055	
14	Sukolilo	10.787	100.148	
15	Mulyorejo	2.814	85.292	
	Total Surabaya	71.171	745.807	9,54
Surabaya Selatan				
16	Sawahan	27.481	188.766	
17	Wonokromo	13.048	146.875	
18	Karang Pilang	2.696	71.478	
19	Dukuh Pakis	4.999	57.246	
20	Wiyung	5.838	51.780	
21	Wonocolo	5.370	81.660	
22	Gayungan	1.952	39.837	
23	Jambangan	5.609	39.234	
	Total Surabaya	66.990	676.876	9,90
Surabaya Barat :				
24	Tandes	12.109	93.459	
25	Sukomanunggal	5.079	107.514	
26	Asemrowo	8.722	36.937	
27	Benowo	11.933	67.074	
28	Lakarsantri	10.955	78.334	
	Total Surabaya Barat	48.795	383.318	12,78
	Total Surabaya	296.498	2.599.796	11,40

Sumber : BPS, Survey Kemiskinan Jawa Timur 2012

Menurut data tabel diatas kemiskinan di Surabaya paling tinggi di wilayah Surabaya Utara dengan prosentase 15,43 persen atau sekitar 73.173 jiwa orang miskin dari jumlah total penduduk disana. Dengan

angka kemiskinan yang terus meningkat tentunya dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan Kota Surabaya. Kemiskinan memberi gambaran kurangnya keterampilan dan rendahnya pengetahuan, terbatasnya modal yang dimiliki, kurangnya pendapatan serta rendahnya produktifitas.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan sejak tahun 2007. PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan program penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan dengan mendasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat. Program PNPM Mandiri perkotaan juga dilaksanakan di kota Surabaya untuk membantu warga miskin yang ada di Surabaya. Program ini diharapkan dapat membantu warga Kota Surabaya yang masih termasuk dalam warga miskin. Berikut merupakan data program PNPM Mandiri terutama PNPM Mandiri perkotaan yang dilaksanakan di Kota Surabaya.

Salah satu wilayah yang termasuk dalam wilayah termiskin di Surabaya adalah wilayah Surabaya utara, dimana lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di wilayah tersebut. Wilayah Surabaya utara sendiri menempati urutan teratas dalam jumlah penduduk miskin di Surabaya. Penelitian di laksanakan di kecamatan Krembangan dan mengambil lokasi di salah satu Kelurahan di kecamatan ini, yaitu Kelurahan Morokrembangan. Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti "Efektifitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya" karena Kelurahan Morokrembangan dalam penerapan program PNPM mandiri dianggap berhasil dalam pelaksanaan dan salah satu program dari pemberdayaan masyarakatnya yang mengenai lingkungan serta penataan wilayah kumuh akan menjadi percontohan untuk nasional. Program ini di bentuk dalam usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan warga miskin yang ada di kelurahan Morokrembangan agar lebih baik. Kelurahan Morokrembangan, wilayah seluas 856,44 hektare, kini dihuni sebanyak 124.490 orang atau sekitar 6.500 kepala keluarga. Ada tiga pendekatan dalam pembangunan kawasan kumuh tersebut, yakni perbaikan lingkungan, perbaikan sumber daya manusia, serta perbaikan dan pengembangan usaha masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sasaran pengentasan kemiskinan kota terdiri atas tiga kelompok. Yakni, gelandangan, penduduk kawasan yang kumuh tapi masih bisa diatur, serta kawasan kumuh yang sangat padat dan ekstrim.

Dari pemaparan diatas, maka penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana pelaksanaan PNPM mandiri perkotaan yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya dan dilaksanakan di Kelurahan

morokrembangan dalam meningkatkan taraf kehidupan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di Kelurahan Morokrembangan sesuai dengan tujuan diadakannya program PNPM mandiri perkotaan tersebut oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan program-program dalam rangka memberantas kemiskinan di wilayah Kota Surabaya dan juga diharapkan menjadi acuan dimana dapat diketahui kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dalam proses dilaksanakannya program PNPM mandiri perkotaan tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.¹ Menurut pranarka dan Moeljarto Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.²

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produksi yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³

Menurut John Friedman, Pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Bahkan dalam perspektif ilmu politik, kekuatan menyangkut pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan oleh individu, dalam keadaan tersebut masing-masing

¹ Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, hal. 58

² Pranarka, A.M.W & Moeljarto V, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, hal. 44

³ Suharto, Edi. *Op.cit*, hal. 58

individu mempunyai pilihan dan kontrol pada semua aspek kehidupannya.⁴

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.⁵

Visi PNPM Mandiri Perkotaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perkotaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan;
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;

⁴ Friedman, John. (1992) *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: Blackwell Publisher

⁵

http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri

[Perkotaan](#), diakses pada tanggal 25/01/2014)

c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

Efektivitas Program

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁶ Efektivitas adalah apabila suatu program yang telah diputuskan untuk dilaksanakan telah dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini, setiap program dari organisasi yang menjalankannya pasti telah mengukur bagaimana mereka mencapai tujuan yang dikehendaki sehingga efektivitas program tersebut tercapai. Definisi efektivitas menurut Peter Drucker ialah "Suatu ukuran yang dilakukan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Dikatakan efektif apabila terpenuhi target yang ingin dicapai baik dari segi kuantitas maupun segi kualitasnya."⁷

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan Gie mengatakan bahwa efektivitas adalah "Suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya."⁸

Mc Graham Hill mendefinisikan efektivitas sebagai "Sebuah organisasi yang dapat menentukan dengan tepat tujuan yang dipilih dan menentukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut."⁹

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan

⁶ Siagian, Sondang P. (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta, hal 24.

⁷ dalam Bangun, Wilson, 2008, *Intisari Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, hal. 5.

⁸ The Liang, Gie, 1997, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 57.

⁹ Hill, Mc. Graham, 2003, *Contemporary Management*, 3rd edn, New York, hal. 6.

efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. efektivitas pelaksanaan suatu program harus sesuai dengan perencanaan program tersebut. Setiap program memiliki target pencapaian masing-masing yang akan dicapai melalui pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹⁰

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹¹ Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.¹²

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹³
- b. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya.¹⁴

c. Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.¹⁵

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

Ukuran Efektivitas program

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Berdasarkan ukuran efektivitas diatas, maka keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi Efektivitas terdapat enam indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas. Tujuh

¹⁰ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru*, (Surabaya : Mekar, 2008), 132

¹¹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 4.

¹² Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam

Maksensius, (Yogyakarta : Amara Books, 2006), 270.

¹³ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaruan, 2005), 109.

¹⁴ Martani dan Lubis, *Teori Organisasi*, (Bandung : Ghalia Indonesia, 1987), 55.

¹⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 92.

indikator tersebut, sangat dibutuhkan dalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari :

Pencapaian Tujuan

pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrtit, (3) dasar Hukum.

Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisasi.

Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana.

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan maka peneliti menggunakan teori pengukuran efektifitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Richard M. Steers.

Adapun pemaparan secara ringkas kerangka konseptual di atas, dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar I.1. Kerangka Konsep Efektivitas PNPM

Mandiri Perkotaan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian berkembang dengan menggunakan teknik *snowball*, dimana pemilihan informan lanjutan dengan tujuan penggalan data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman informasi yang diperoleh atas dasar rekomendasi dari *key informan*, kemudian untuk memperoleh informasi tambahan dari pengguna layanan teknik yang digunakan adalah *accidental sampling*, dimana pemilihan informan dipilih dari setiap unit layanan, sehingga data yang dibutuhkan akan semakin jelas. Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dan data skunder. Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Dan teknik analisis data kualitatif mengikuti pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:246), yaitu reduksi data, penyajian data dilakukan dengan menggunakan bentuk teks naratif, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi.

Hasil Penelitian

Efektifitas Program PNPM Mandiri dalam mengentaskan kemiskinan di kelurahan Morokrengan

PNPM Mandiri perkotaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri perkotaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dalam penerapannya PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan dinilai efektif karena telah sesuai dengan tujuan dari program PNPM Mandiri

perkotaan yaitu memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Sebagaimana menurut Gie efektivitas adalah “Suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.”¹⁶

Dalam efektivitas hal yang mendasari ialah adanya tujuan yang telah tercapai, tujuan ini merupakan keadaan dimana terjadi karena dikehendaki oleh pihak pelaksana program. Pihak pelaksana PNPM mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan yakni BKM Morosejahtera memiliki visi dan misi dimana juga menjadi tujuan mereka dalam penerapan setiap program pemberdayaan yang mereka laksanakan dan diikuti oleh masyarakat di kelurahan morokrengan. Berikut visi dan misi BKM Morosejahtera kelurahan Morokrengan

Visi BKM Moro Sejahtera :

Terwujudnya Masyarakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan pemukiman sehat , produktif, dan mandiri.

Misi BKM Moro Sejahtera :

Membangun masyarakat mandiri yang menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menaggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya pemukiman yang tertata, sehat , produktif, dan berkelanjutan.

Hampir seluruh masyarakat yang mengikuti program-program pemberdayaan yang dilaksanakan mendapatkan bantuan baik berupa bantuan ilmu pengetahuan dengan pemberdayaan dimana adanya pelatihan-pelatihan yang mengembangkan kreatifitas mereka dan mendorong mereka untuk berinovasi dalam membuka usaha rumah tangga yang nantinya membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Sehingga dari sini tampak bahwa tujuan dari program PNPM Mandiri perkotaan itu sendiri untuk memberdayakan masyarakat telah tercapai. Hal ini sesuai dengan seperti yang dikatakan Mc Graham Hill dalam mendefinisikan efektivitas “Sebuah organisasi yang dapat menentukan dengan tepat tujuan yang dipilih dan menentukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.”¹⁷

¹⁶ The Liang, Gie, 1997, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 57.

¹⁷ Hill, Mc. Graham, 2003, *Contemporary Management*, 3^h edn, New York, hal. 6.

BKM Morosejahtera melakukan tridaya dimana meliputi pemberdayaan sosial , pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan lingkungan. Ketiga hal ini menjadi hal yang utama di kelurahan Morokrengan merujuk pada permasalahan yang ada di kelurahan Morokrengan. Sehingga ketika menyusun perencanaan program-program pihak BKM Morosejahtera juga ikut membimbing dan mengawasi masyarakat hal ini termasuk dalam pemberdayaan sosial dimana masyarakat di ajarkan cara pembuatan proposal yang mana nantinya berguna di masa yang akan datang apabila masyarakat ingin mengajukan proposal kepada pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan rencana dan pelaksanaan program mereka hal ini menunjukkan masyarakat di kelurahan Morokrengan yang aktif mengikuti program PNPM Mnadiri perkotaan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁸

Tahap pertama yang dilalui dalam pemberian program PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan kepada masyarakat kelurahan Morokrengan adalah sosialisasi baik yang pertama dari badan pemberdayaan masyarakat nasional yang dilaksanakan di kecamatan yang kemudian di laksanakan lagi sosialisasi dari pihak kelurahan dan BKM kepada masyarakat agar dapat lebih memahami apa maksud program PNPM Mandiri perkotaan dilaksanakan di kelurahan Morokrengan. Dalam hasil data dan analisis di jelaskan bahwa sosialisai telah dilakukan sejak pertama kali program PNPM Mandiri perkotaan di laksanakan di kelurahan Morokrengan dan bahkan setiap ada program baru selalu dilakukan sosialisasi terutama program yang berhubungan dengan pemberdayaan sosial seperti kegiatan pelatihan pembuatan spre, sapu, sabun aroma, kue-kue dan lainnya. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memahami dan menjadi tertarik mengikuti Program PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan. Selain program pemberdayaan sosial juga dilaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan. Dalam data yang di peroleh pemberdayaan ekonomi berbasis kepada pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat kelurahan Morokrengan yang tergabung dalam KSM-KSM yang dalam setiap KSM tersebut terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 10 orang yang nantinya mengajukan pinjaman secara kelompok. Dalam pemberdayaan ekonomi ini juga dilaksanakan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui mekanisme jalan nya pinjaman bergulir ini. Berbeda dengan pemberdayaan ekonomi ,pemberdayaan lingkungan lebih memfokuskan pembangunan insfrastruktur di kelurahan Morokrengan dan selalu dilaksanakan sosialisai setiap ada program pemberdayaan lingkungan yang direncanakan agar masyarakat

¹⁸ Suharto, Edi. *Op.cit*, hal. 58

megetahui program apa yang akan dilaksanakan dan ikut berpartisipasi.

Selain sosialisasi, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak aparat pelaksana dan kelompok sasaran, hal ini di kelurahan Morokrengan sendiri dapat di lihat dengan adanya musyawarah bersama ketika merencanakan setiap program-program yang di peruntukkan untuk masyarakat. Sehingga nantinya tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak BKM Morosejahtera dan anggota KSM-KSM di kelurahan Morokrengan serta program dapat dilaksanakan dan diarahkan dengan baik. Berdasarkan paradigma Lasswell secara sederhana proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (*encode*) pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu.¹⁹

Sesuai dengan data yang diperoleh mengenai pelaksanaan program PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan sebagai bagian dari salah satu program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, BKM Morosejahtera membantu masyarakat yang terbentuk dalam KSM-KSM untuk menyusun proposal program tiap-tiap KSM. Penentuan perencanaan program, penyusunan proposal, pemilihan anggota KSM serta pelaksanaan nya apabila telah disetujui dilakukan semua nya oleh KSM-KSM itu sendiri sedangkan pihak BKM mendampingi. Setelah proposal diajukan dan disetujui, KSM diharapkan melakukan survei harga bahan pokok yang diperlukan dan nantinya di pilih menurut harga dan kualitas yang paling efisien. Pelaksanaan tiap program di dampingi dan dalam pengawasan BKM maupun dari tim faskel, KSM selalu di pantau bagaimana progress dari program yang mereka laksanakan dan KSM juga dapat memberitahukan kendala dan permasalahan apa saja yang timbul ketika program dilaksanakan sehingga akan di rundingka secara musyawarah bagaimana menangani permasalahan dan kendala yang ada. BKM disini menunjukkan sebagai aparat pelaksana program yang selalu mendampingi KSM dalam setiap prrogram yang mereka laksanakan. Hal ini mendukung agar program PNPM Mandiri perkotaan yang di selenggarakan di kelurahan Morokrengan menjadi program yang efektif membantu masyarakat. BKM Morosejahtera selalu siap mendengarkan setiap keluhan anggota KSM yang mengalami kendala dalam pelaksanaan program mereka. Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan

sifat demokratis.²⁰ Apabila pelaksana program memiliki disposisi yang baik maka program akan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang telah direncanakan sebelumnya. Namun apabila pelaksana program memiliki perspektif yang berbeda dengan tujuan program maka proses pelaksanaan program akan ada kecenderungan untuk menjadi tidak efektif.

Dukungan kelompok atau keikutsertaan masyarakat di kelurahan Morokrengan dalam program PNPM Mandiri menjadi hal yang penting untuk mewujudkan efektifitas program PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan. Masyarakat Morokrengan yang aktif mendukung program PNPM Mandiri dapat dilihat dari jumlah KSM yang ada di kelurahan Morokrengan yang berjumlah 189 KSM untuk program pinjaman bergulir yaitu merupakan pemberdayaan ekonomi. Dalam pemberdayaan sosial KSM yang terbentuk sekitar 19 KSM yang mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan, namun tidak semua anggota dalam KSM itu aktif mengikuti setiap kegiatan menurut data yang di kumpulkan banyak terjadinya penurunan jumlah anggota KSM yang terjadi karena masyarakat kurang memiliki semangat untuk mencoba membuka usaha sendiri dan hanya mau mendapatkan hasil yang instant. Hal ini tentunya berdampak pada efektifitas program PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan. Dalam pemberdayaan lingkungan diketahui terdapat 9 KSM yang dibentuk untuk menangani pembangunan infrastruktur di kelurahan Morokrengan. Ke 9 KSM ini menjadi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan hingga pelaksanaan program dan pemeliharaan namun tentunya dalam pemeliharaan diharapkan semua warga masyarakat di kelurahan Morokrengan berpartisipasi menjaga pembangunan infsrstruktur yang bertujuan untuk menjadikan kelurahan Morokrengan memiliki lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dan mengurangi tempat-tempat kumuh di kelurahan Morokrengan. Dengan masyarakat atau sumberdaya manusia yang aktif maka program PNPM Mandiri di kelurahan Morokrengan akan menjadi lebih efektif. Sumberdaya memegang peranan penting dalam keefektifan pelaksanaan program. Sebagai apapun suatu program jika tidak didukung oleh sumberdaya yang mencukupi akan sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.²¹ Namun ada sumberdaya lainnya yang tidak kalah penting dengan kedua sumber daya lainnya, yaitu sumberdaya fisik yang merupakan sarana dan prasarana

¹⁹ Dalam Sendjaja, Sasa Djuarsa, 1994, *Pengantar Komunikasi*, Jakarta: Universitas Terbuka.

²⁰ Subarsono, Ag, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 92.

²¹ Sendjaja, Sasa Djuarsa, *Op. cit*, hal. 91.

yang digunakan pelaksana dalam melaksanakan program yang telah direncanakan.

Masyarakat di kelurahan Morokrengan telah cukup baik mengetahui tujuan dan maksud dilaksanakannya program PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan mereka, hal ini berdasarkan hasil data semua masyarakat yang aktif mengikuti program PNPM mandiri perkotaan bisa memahami bahwa program pemerintah ini memang di peruntukkan untuk masyarakat, yang nantinya tiap program-program tersebut ditentukan, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelurahan Morokrengan baik permasalahan ekonomi lingkungan maupun sosial.

Wujud dari upaya pengentasan kemiskinan ini berupa peningkatan kemandirian diri melalui soft skill serta peningkatan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan Morokrengan dilaksanakan konsep tridaya yaitu pemberdayaan masyarakat berupa pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pemberdayaan Menurut Priyono & Pranaka menjelaskan bahwa memberdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.²² pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Di kelurahan Morokrengan masyarakat menjadi pihak yang diberdayakan dan pihak BKM Morosejahtera menjadi wadah bagi pihak yang memberdayakan warga masyarakat kelurahan Morokrengan.

1. Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan yang dilaksanakan di kelurahan Morokrengan berupa kegiatan pembangunan lingkungan infrastruktur yang dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki keadaan lingkungan di Morokrengan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadikan kelurahan Morokrengan memiliki lingkungan yang lebih baik lagi dan tentunya lingkungan yang lebih sehat sesuai dengan visi dan misi BKM Morosejahtera untuk menjadikan kelurahan Morokrengan menjadi sejahtera dalam lingkungan pemukiman sehat, produktif, dan mandiri.

2. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya hal ini tercantum dalam UU Nomor 11 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Di kelurahan Morokrengan pemberdayaan sosial menjadi salah satu program dari BKM Morosejahtera, pemberdayaan sosial yang dilaksanakan di kelurahan Morokrengan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga masyarakat Morokrengan. Berikut rekap kegiatan pemberdayaan sosial yang dilaksanakan di kelurahan Morokrengan.

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dimaksudkan untuk penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi Rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam/Agraria secara Adil dan Berkelanjutan, yang berlandaskan pada substansi yang dimaknai bahwa Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berlandaskan pada Alat Produksi/Faktor Produksi dan Proses Produksi tetap berada dalam penguasaan, kontrol dan pengelolaan rakyat.

Pemberdayaan ekonomi di kelurahan Morokrengan yang dilaksanakan oleh bagian unit keuangan BKM Morosejahtera adalah pemberian pinjaman bergulir kepada masing-masing KSM, dimana uang yang dipinjam dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai modal usaha maupun untuk keperluan mendesak seperti untuk kesehatan maupun pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu BKM Morosejahtera juga mengajak KSM menjadi agen LPG

²² Priyono, S. Onny & A.M.W Pranarka, *Op. cit*, hal. 97.

untuk menambah pendapatan mereka. Kredit macet sendiri ialah pinjaman yang belum dilunasi oleh beberapa KSM, hingga tahun 2014 sebesar Rp. 208.856.252,- (Dua ratus delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), atau turun Rp. 4.622.300,- (Empat juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar 2,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pihak BKM Morosejahtera juga telah melakukan Pendekatan secara kekeluargaan kepada para peminjam yang belum melunasi kewajibannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Efektifitas pelaksanaan program PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan berjalan dengan baik. Program PNPM Mandiri perkotaan sangat efektif di jalankan di kelurahan Morokrengan hal ini dapat dilihat dari adanya pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat kelurahan Morokrengan yang bertujuan untuk membantu mereka mensejahterakan kehidupan mereka baik dalam sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, komunikasi, sikap pelaksana, dan dukungan kelompok sasaran menjadi hal yang penting dimana berjalan dengan baik di kelurahan Morokrengan sehingga membantu program PNPM Mandiri perkotaan di kelurahan Morokrengan menjadi lebih efektif. Sesuai dengan tujuan program PNPM Mandiri perkotaan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan Morokrengan telah sesuai dengan tujuan dan telah mencapai tujuan dari Program PNPM Mandiri perkotaan. Masyarakat kelurahan Morokrengan telah menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Masyarakat di kelurahan Morokrengan merupakan pemeran utama dalam kegiatan PNPM Mandiri perkotaan yang dilaksanakan di kelurahan Morokrengan. Harapan masyarakat merupakan hal yang penting dimana masyarakat adalah pihak-pihak yang telah merencanakan dan melaksanakan tiap-tiap program pemberdayaan yang telah disesuaikan dengan tujuan program PNPM Mandiri perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian harapan masyarakat belum sepenuhnya telah tercapai, masyarakat di kelurahan Morokrengan mengharapkan agar mereka dapat mendapatkan penghasilan dari penjualan hasil produksi usaha yang mereka rintis namun, pada kenyataannya hasil dari penjualan barang produksi mereka masih belum bisa menjadi penghasilan utama bagi masyarakat di kelurahan Morokrengan.

DAFTAR PUSTAKA :

- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Fermana, Surya, 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta
- Gie, The Liang, 1997, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Islami, Irfan, 1988. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Modul Universitas Terbuka, Jakarta.
- Koentjaraningrat, (ed), 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Leo, Agustino, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, J.Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda.
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia, Indonesia.
- Pranarka, A.M.W & Moeljarto V, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Prijono, S.Onny & A.M.W Pranarka, 1996, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa, 1994, *Pengantar Komunikasi*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Subarsono, Ag, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Siagian, Sondang P. (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press : Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1981, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Widodo, Joko, M.S., 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing, Malang.

Suntoro, Irawan, M.s., 2015. *Kebijakan Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Melalui internet :

<http://simpadu-pnpm.bappenas.go.id/DesInventar/dashboard.jsp>

<http://www.pnpm-mandiri.org/>

<http://lkm-amanah.webnode.com/>

<http://arsip.pnpm-mandiri.org/>

